

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 1 TAHUN 2005**

---

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 01 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBUATAN PRODUK HUKUM  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan otonomi daerah tugas pembantuan, maka kebijakan regulasi dan legislasi yang tertuang dalam produk hukum serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku perlu pedoman dan prosedur pembuatan produk hukum;
- b. bahwa produk hukum di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi adalah landasan kebijakan yang merupakan legislasi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu di tetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman dan Prosedur Pembuatan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambhaan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratruan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2004 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah and Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 10 Seri D);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBUATAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Walikota adalah Walikota Bekasi;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota;
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Walikota untuk melaksanakan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersifat pengaturan;
7. Program Legislasi Daerah adalah Instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis;
8. Pengundangan adalah penetapan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah. Tambahan Lembaran Daerah, Berita Daerah, Tambahan Berita Daerah;

9. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Lembaga Teknis Daerah;
10. Produk Hukum adalah Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonstruksi dan tugas pmbantuan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dari pada Peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman dalam keseragaman pembuatan penyusunan produk hukum di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

Tujuan dari pada Peraturan Walikota ini adalah agar dalam setiap pembuatan produk hukum dimaksud dapat terwujud suatu produk hukum sengan metode yang pasti, baku dan standar.

## **BAB III**

### **BENTUK PRODUK HUKUM**

#### **Pasal 4**

Jenis dan hirarki prduk hukum di lingkungan Pemerintahan Daerah adalah :

- a. Peraturan Daerah
- b. Peraturan Walikota
- c. Keputusan Walikota
- d. Instruksi Walikota
- e. Keputusan Perangkat Daerah

#### **Pasal 5**

Bentuk dan model produk hukum sebagaimana Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## **BAB IV**

### **AZAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **Pasal 6**

Dalam membuat produk hukum harus berdasarkan pada azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan amteri mautan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

### **Pasal 7**

Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung azas :

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebudayaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka tunggal ika;
- g. Kehadiran;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keselerasian dan keselarasan.

## **BAB V**

### **MATERI BUATAN**

#### **Pasal 8**

Materi Muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **Pasal 9**

Materi muatan Peraturan Walikota adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah atau delegasi dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat pengaturan.

#### **Pasal 10**

Materi muatan Keputusan Walikota/Keputusan Perangkat Daerah adalah semua materi muatan Keputusan yang dirumuskan dalam dictum-diktum dan bersifat penetapan.

## **Pasal 11**

Materi muatan Instruksi Walikota adalah semua materi instruksi yang dirumuskan dalam diktum-diktum dan bersifat perintah.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMBUATAN**

## **Pasal 12**

- (1) Tata Cara pembuatan produk hukum sebagaimana Pasal 4 berpedoman pada Tata Naskah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mekanisme penyampaian produk hukum adalah sebagai berikut :
  - a. Perangkat daerah mengajukan rancangan produk hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bagian Hukum;
  - b. Rancangan produk hukum dimaksud sebelum ditandatangani oleh Walikota dibahas terlebih dahulu dengan perangkat daerah yang terkait, kecuali rancangan peraturan daerah dan produk hukum lainnya yang memerlukan persetujuan DPRD disampaikan rancangannya ke DPRD setelah dibahas dengan Perangkat Daerah terkait;
  - c. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari inisiatif DPRD disampaikan kepada Walikota selanjutnya dibahas sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. Produk hukum yang akan ditetapkan oleh Walikota di paraf terlebih dahulu oleh Perangkat Daerah Pengolah, Kepala Bagian Hukum dan Sekretaris Daerah dan/atau oleh satuan kerja pada perangkat daerah bagi produk hukum yang didelegasikan oleh Walikota kepada Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lainnya untuk dan atas nama Walikota;
  - e. Setiap lembar asli produk hukum diberikan tanda paraf Kepala Bagian Hukum pada sisi kanan bawah;
  - f. Untuk salinan dan/atau rekaman produk hukum yang digunakan untuk keperluan tertentu yang berhubungan dengan pembuktian dan/atau sifatnya penting perlu mendapatkan outentikasi dari Kepala Bagian Hukum atas nama Sekretaris Daerah;
  - g. Registrasi dan penomoran prodduk hukum dicatat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  - h. Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota yang memerlukan persetujuan dan evaluasi dari Gubernur disampaikan melalui Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Khusus untuk perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang mendapat persetujuan DPRD harus dilaksanakan berdasarkan legalisasi dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 13**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Walikota disampaikan dengan Surat Pengantar Walikota kepada DPRD oleh Walikota.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota.

### **Pasal 14**

- (1) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

### **Pasal 15**

Apabila dalam satu masa sidang, Walikota dan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah yang sama, maka yang dibahas Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

### **Pasal 16**

- (1) Bahasa yang digunakan dalam produk hukum adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila terdapat bahasa asing, maka perlu diterjemahkan kedalam bahasa asing sepanjang untuk keperluan tertentu seperti promosi di bidang usaha/dagang, kerjasama dengan pihak luar negeri dan/atau organisasi internasional.

## **BAB VIII**

### **PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengundangan**

### **Pasal 17**

Peraturan Daerah diundangan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Walikota diundangan dalam Berita Daerah.

### **Pasal 18**

Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Walikota dalam Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Penyebarluasan**

#### **Pasal 19**

- (1) Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Walikota yang telah diundangkan dalam Berita Daerah wajib disebarluaskan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Untuk mempersiapkan pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 18 dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 20**

Teknik penyusunan dan/atau bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, Instruksi Walikota, dan Keputusan Perangkat Daerah harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk produk hukum yang diatur dalam Peraturan ini.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Semua Keputusan Walikota yang bersifat mengatur yang sudah ada sebelum peraturan ini berlaku, harus dibaca Peraturan Walikota sepanjang tidak ada bertentangan dengan Peraturan ini.

#### **Pasal 22**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 25 Februari 2005

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 25 Februari 2005

**SEKRETARIS DAERAH**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**  
Pembina Tk.I  
NIP 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2005 NOMOR 1



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 01 TAHUN 2005

Tanggal : 25 Februari 2005

**BENTUK-BENTUK PERATURAN DAERAH  
DAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN**

**A. KERANGKA PERATURAN DAERAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI**

**NOMOR.....TAHUN**

**TENTANG  
(nama Peraturan Daerah)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

Menimbang : a. Bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**dan**

**WALIKOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG.....(nama Peraturan Daerah).**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

.....

**BAB II**

.....

**Pasal ....**

**BAB ...**  
(dan seterusnya)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal .....

**WALIKOTA BEKASI**

**(tanda tangan)**

**(NAMA)**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal .....

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**(tanda tangan)**

**(NAMA)**

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN .....NOMOR.....SERI.....

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI**  
**NOMOR..... TAHUN.....**  
**TENTANG**  
**(Nama Peraturan Daerah)**

I. **PENJELASAN UMUM**

.....  
.....

II. **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan.....adalah.....

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal.....dst

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR.....SERI.....

**B. KERANGKA PERATURAN DAERAH PERUBAHAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI**  
**NOMOR.....TAHUN.....**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI**  
**NOMOR.....TAHUN.....TENTANG.....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BEKASI,**

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....

**Dengan Persetujuan Bersama**

**Dan**

**WALIKOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR.....TAHUN.....TENTANG.....**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor.....Tahun.....tentang.....(Lembaran Daerah  
Tahun.....Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Nomor.....Tahun.....)

- A. Pasal 5 dihapus
- B. Ayat (3) Pasal 7 dihapus
- C. Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 8”**

(1) .....

(2) .....

- D. Pada pasal 10 ditambah ayat  
(5) Yang berbunyi :  
(5) .....

E. Diantara Pasal 14 dan 15, disisipkan 1(satu) pasal 14 A” baru yang

**“Pasal 14 A”**

.....

F. Dalam Pasal 18, perkataan “.....”

G. Dalam ayat (2) dari Pasal 20, diantara  
Perkataan “.....” Dan “.....”  
disisipkan perkataan “.....”

H. Dalam ayat (2) dari Pasal 27, perkataan “  
.....” Dihapuskan.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal .....

**WALIKOTA BEKASI**

**(tanda tangan)**

**(NAMA)**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal .....

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**(tanda tangan)**

**(NAMA)**

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN .....NOMOR.....SERI.....

**C. KERANGKA PERATURAN WALIKOTA**

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR.....TAHUN.....**

**TENTANG  
(nama Peraturan Walikota)**

**WALIKOTA BEKASI,**

Menimbang : a. Bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG.....(nama Peraturan Walikota).**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

.....

**BAB II**

.....

**Pasal ....**

**BAB.....**

(dan seterusnya)

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal .....

**WALIKOTA BEKASI**

**(tanda tangan)**

**(NAMA)**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal .....

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**(tanda tangan)**

**(NAMA)**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN .....NOMOR.....

**D. KERANGKA PERATURAN WALIKOTA PERUBAHAN**

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR.....TAHUN.....**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR.....TAHUN.....TENTANG (nama Peraturan Walikota)**

**WALIKOTA BEKASI,**

Menimbang : a. Bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR..... TAHUN..... TENTANG (nama Peraturan Walikota).**

**Pasal I**

Peraturan Walikota Bekasi  
Nomor.....Tahun.....tentang.....(Berita Daerah  
Tahun.....Nomor.....) diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 5 dihapus
- B. Ayat (3) Pasal 7 dihapus
- C. Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 8”**

- (1) .....
- (2) .....
- D. Pada pasal 10 ditambah ayat  
(5) Yang berbunyi :  
(5) .....

E. Diantara Pasal 14 dan 15, disisipkan 1 (satu) pasal “Pasal 14A” baru yang berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 14A”**

.....

- F. Dalam Pasal 18, perkataan “.....”  
Dibaca “.....”
- G. Dalam ayat (2) dari Pasal 20, diantara Perkataan “.....” dan.....”  
Disisipkan perkataan “.....”
- H. Dalam ayat (2) dari Pasal 27, perkataan “.....” dihapuskan.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat menegetahuiny, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal .....

**WALIKOTA BEKASI**

**(tanda tangan)**

**(NAMA)**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal .....

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**(tanda tangan)**

**(NAMA)**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN .....NOMOR.....

## **E. KERANGKA KEPUTUSAN WALIKOTA**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR ... ..**

**TENTANG**  
**(nama Keputusan Walikota)**

**WALIKOTA BEKASI,**

Menimbang : a. Bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : (sesuai dengan judul Keputusan Walikota) .....

KEDUA : .....

KETIGA : dan seterusnya .....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal .....

**WALIKOTA BEKASI**

**(tanda tangan)**

**(NAMA)**

Tembusan :

- Yth. 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;

**F. KERANGKA INSTRUKSI WALIKOTA**

**INSTRUKSI WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR.....TAHUN.....**

**TENTANG  
(nama Instruksi Walikota)**

**WALIKOTA BEKASI,**

Menimbang : a. Bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;

2. ....;
3. dan seterusnya.....;

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada : 1. (Perangkat Daerah yang diberi instruksi).....;  
2. dan seterusnya.....;
- Untuk :
- PERTAMA : (sesuai dengan instruksi Walikota).....
- KEDUA : .....
- KETIGA : dan seterusnya.....
- KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal .....

**WALIKOTA BEKASI**

(tanda tangan)

(NAMA)

**G. KERANGKA KEPUTUSAN PERANGKAT DAERAH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR ... ..**

**TENTANG**  
**(nama Keputusan Walikota)**

**WALIKOTA BEKASI,**

Menimbang : a. Bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;

**MEMUTUSKAN :**

Kepada : 1. (Perangkat Daerah yang diberi instruksi).....;  
2. dan seterusnya.....;

Untuk :

PERTAMA : (sesuai dengan judul keputusan Walikota).....

KEDUA : .....

KETIGA : dan seterusnya.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal .....

**a.n WALIKOTA BEKASI**

**(tanda tangan)**

**(NAMA)**

Tembusan :

Yth. 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;

**H. KERANGKA KEPUTUSAN PERANGKAT DAERAH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR ... ..**

**TENTANG**  
**(nama Keputusan Perangkat Daerah)**

**PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,**

Menimbang : a. Bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;

**MEMUTUSKAN :**

Kepada : 1. (Perangkat Daerah yang diberi instruksi).....;  
2. dan seterusnya.....;

Untuk :

PERTAMA : (sesuai dengan judul keputusan Walikota).....

KEDUA : .....

KETIGA : dan seterusnya.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal .....

**PIMPINAN PERANGKAT DAERAH**

**(tanda tangan)**

**(NAMA)**

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/cap**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 25 Februari 2005

**SEKRETARIS DAERAH**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**  
Pembina Tk.I  
NIP 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2005 NOMOR 1

